

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legasprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 191
- A. Suriyaman Mustari Pide & Sri Susyanti Nur. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Makassar, Pelita Pustaka.
- A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group.
- Abdurrahman, 1995, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Bandung: Alumni.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A Dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bandung: Alumni.
- , 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan permasalahannya*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Arie S Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah* (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, LPHI).
- Budi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan: Jakarta. Hal. 6.
- Berhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margareta Pustaka.
- Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Danny Haryanto and Nurgroho Edwi, 2011, *Pengantar Sosiologi Dasar* Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Elly M, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 361.

- Goodpaster Gary, 2009. *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips Project.
- Hans Kelsen. 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Huala Adolf, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Topoffset. Percetakan.
- I Wayan Wiryawan, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana: Unversitas Press.
- Laura Nader, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, hal. 9-11.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, Bandung.
- Lidwina Inge Nurcahyo, 2011, *Menelusuri Perkembangan Kajian Pluralisme Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Episterna Institute.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal 162.
- Margareth M Poloma, 2010, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria S.W Sumardjono et al, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Buku Kompas.
- Maria Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Maskur, Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hal. 71
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mukti Fajar Nurdewata, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi*, Seminar Awig-Awig II, Bali.
- Rusmadi Murad, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Rachmadi Usaman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya.
- Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simon Fisher, 2001, *Mengelola Konflik; Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council.
- Sudargo Gautama dan Sukarhar Badwi. 1973. *Tafsiran Undang-undang Agrarian*. Alumni Bandung: Bandung.
- Sulastriyono. 1997. *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*. Tesis, Jakarta: Program Padsa sarjana UI.

- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo.
- , 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 8.
- Susan Novri, 2009, *Sosiologi Konflik Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta Kencana.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia).
- Syahrizal Abbas, 2017, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tohirin, 2013. *Bimbingan dan konseling islam dan madrasah (berbasis integrasi)*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Wandi Adiansah, 2019, *Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 1 Nomor 1 Universitas Padjadjaran, Bandung.

JURNAL

- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, and Erwin, 2020 “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster*,” Pampas, Journal of Criminal, Vol 1, No. 3.
- Abdul Latif, et. al, 2018, “*Mediasi Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bangkalan*”, Vol 12 No. 2.
- Deddy Ilham Perdana and Yuliana, 2015, “*Analisis Konflik Atau Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu Di Desa*

- Tumbang Marak, Kalimantan Tengah,*” Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol 1, No. 1.
- Ellya Rosana,2010 “*Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern),*” Jurnal Al-AdYaN, Vol 10, No. 2.
- H Joni,2016, “*Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional,*” Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 7, No. 1.
- Hamidi dan M.A. Latif, 2021 “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional*” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Umum dan Hukum Islam* Vol. 12, No. 1.
- I Gusti Agung Wisudawan, 2019, “*Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis (Di Desa Gelogor,Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat),*” Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 4, No. 2.
- Layyin Mahfiana, 2013, “*Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo,*” Jurnal Kodifikasia, Vol 7, No. 1.
- M. Yasin Al Arif, 2019, “*Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,*” *Undang Jurnal Hukum,* Vol 2, No. 1.
- Maharani Nurdin, 2018,“*Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Positum, Vol.3, No. 2.
- Nia Kurniati,2016, “*Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*”, *Sosiohumaniora* Vol.18, No. 3.
- Rika Lestari,2013, “*Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia,*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 2.
- Roeroe Sarah DL,2013 “*Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan,*” Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1, No. 6.
- Sartika Intaning Pradhani, 2021. *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional.* Volume 04 No.1.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- S.M. Korah, Revy, 2013, "*Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*," *Jurnal Hukum*, Vol 21, No. 3.
- Syuryani, 2016, "*Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*," *Jurnal Menara Ilmu*, Vol, 10, No. 2.
- Ulfia Hasanah, 2017, "*Penyelesaian Sengketa Oleh Fungsionaris Adat di Kabupaten Kampar*," *Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau Law Journal*, Vol. 1 Nomor 2 November 2017. Hal. 245
- Wahyu ramadhani, 2019, "*Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Aceh*," *Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa, Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 14 Nomor Juli Desember 2019. Hal.219
- Wandi Adiansah, Nurliana Cipta Apsari, and Santoso Tri Rahardjo, 2019 "*Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 1, No. 1.
- Wawan Susilo, 2019, "*Problematika upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo*," *Jurnal IUS, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo*, Vol VII, Nomor 01, Hal 78

SEMINAR

- Moh. Mahfud MD, 2010, "*Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi*," *Seminar Awig-Awig II, Bali, 30 September 2010*.
- Rae Netha Junaedy, 2015, "*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura*", *Skripsi. Hukum Pidana Fakultas Hasanuddin, Makassar*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua.

INTERNET

<https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/32579>.